

PERAN KAUM MUSLIM TRADISIONALIS DALAM PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI PALEMBANG PADA ERA KOLONIAL

Ismail

Dosen IAIN Raden Fatah Palembang

There have been a lot of studies on the history and development of Islamic education in Indonesia conducted by various groups. At least, there are three important aspects that should be noted in this study. First, from the aspect of the region, the history of Islamic education in South Sumatra which has never been comprehensively studied since the colonial era. Second, related to theoretical assumption, the question of whether the development of the system and the modern Islamic institution in Palembang during colonial era tend to be dominated by Muslim reformers or Muslim traditionalists. Third, from the point of view of methodology which tends to be descriptive and chronological, though recently there arises an analytical approach in which the system and the institution are not seen as things that can stand on their own, but are attached to social, religious, cultural, and political aspects. It is this approach which will be used in this study. Therefore, this study will try to look into the relationship between various social changes in Palembang and the system and Islamic educational institutions in the colonial era.

A. Pendahuluan

Kajian tentang sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia telah menarik perhatian beberapa peneliti dan ilmuwan.

Beberapa penelitian dan buku tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah dapat kita temukan¹. Tulisan ini, yang merupakan ringkasan dan modifikasi dari disertasi² adalah salah satu

¹Beberapa di antaranya adalah Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1998); Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999); Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998); dan Zuhairini (et. al.), *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

²Disertasi yang dipertahankan dalam ujian promosi doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 31 Januari 2005 ini berjudul: "Madrasah dan Sekolah Islam di Karesidenan Palembang: 1925-1942 (Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Masa Kolonial)".

upaya melengkapi kajian sejarah pendidikan Islam yang sudah ada tersebut. Penelitian disertasi itu sendiri dilatar belakangi, antara lain, oleh hasil survai awal yang telah dilakukan terhadap berbagai kajian tentang sejarah pendidikan Islam sebelumnya. Berdasarkan survai bibliografis secara singkat, paling tidak terdapat tiga aspek yang penting untuk dicatat tentang obyek kajian ini. *Pertama*, dari segi daerah yang dikaji, pembahasan sejarah pendidikan Islam belum mencakup semua unit wilayah yang ada di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Jawa, khususnya dalam format pondok pesantren, adalah obyek yang paling banyak dibahas. Sementara untuk wilayah Sumatera, penelitian tentang sejarah pendidikan Islam yang kerap dilakukan adalah di wilayah Aceh dan Sumatera Barat³. Wilayah Sumatera Selatan yang pada masa kolonial mencakup Karesidenan Palembang belum pernah dibahas secara komprehensif meskipun survai awal menunjukkan bahwa di daerah ini telah tumbuh dan berkembang tradisi

pendidikan Islam tertentu yang diikuti oleh upaya modernisasi pendidikan Islam yang cukup dinamis. Meskipun survai awal menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1920-an telah tumbuh dan berkembang puluhan lembaga pendidikan Islam di Karesidenan Palembang, dalam format madrasah dan sekolah umum *met de qur'an* (sekolah Islam), dengan pertimbangan kelengkapan data, kajian ini hanya terfokus pada tujuh madrasah dan sekolah Islam yang pernah ada dalam rentang waktu antara tahun 1925 hingga 1942. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah Madrasah Ali-Ihsan 10 Ilir, Madrasah Arabiyah 13 Ulu, Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir, Madrasah Ahliyah Sekanak 28 Ilir, Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, Madrasah dan Sekolah Nurul Falah 30 Ilir, dan Madrasah dan Sekolah Muhammadiyah di kota maupun desa-desa di Karesidenan Palembang.

Kedua, dari segi asumsi teoretis, yang dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diperoleh kesimpulan umum bahwa upaya

³Penelitian tentang pasang-surut perkembangan lembaga surau di Minangkabau, misalnya, dibahas dalam Azyumardi Azra, "The Rise and the Decline of the Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatra during the Dutch Colonial Government", *Tesis M.A.* di Departement of Middle Languages and Cultures, di Columbia University, Amerika Serikat, 1990, tidak dipublikasikan.

⁴Ketika membahas perkembangan pendidikan Islam modern di Minangkabau, Deliar Noer dan Steenbrink, misalnya, menemukan bahwa kalangan muslim reformislah (kaum muda) yang mempelopori dan banyak berperan dalam usaha pembaruan pendidikan Islam, sedangkan kalangan muslim tradisional (kaum tua) tampak lebih resisten dengan mempertahankan sistem pendidikan tradisional. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996); Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1997).

pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 dipelopori terutama oleh kalangan muslim yang berhaluan reformis, khususnya Muhammadiyah, sejalan dengan upaya pembaruan pemikiran dan praktik Islam yang mereka lakukan⁴. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pola semacam ini berlaku pula pada dinamika perkembangan pendidikan Islam di Karesidenan Palembang ataukah ia memiliki pola perkembangan yang berbeda dari asumsi teoretis yang ada selama ini; atau dengan rumusan pertanyaan lain, “apakah perkembangan sistem dan lembaga pendidikan Islam modern di Karesidenan Palembang selama masa pemerintahan kolonial Belanda cenderung didominasi oleh peranan kalangan muslim reformis ataukah kalangan muslim tradisional?”.

Ketiga, dari segi metodologi, tradisi penulisan aspek pendidikan sebagai realitas historis di Indonesia, mula-mula memang lebih banyak dilakukan secara deskriptif dan kronologis. Salah satu tulisan yang termasuk sangat awal dan cukup komprehensif tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, misalnya, ditulis oleh Mahmud Yunus⁵, yang antara lain mengungkapkan berbagai aspek lembaga dan sistem pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia.

Pada perkembangan lebih lanjut penulisan sejarah pendidikan Islam tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yakni sistem dan lembaga pendidikan Islam tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan aspek-aspek sosial, keagamaan, politik, budaya, dan sebagainya, sehingga yang lahir kemudian adalah sebuah kajian yang disebut sejarah sosial pendidikan Islam yang mengikutsertakan aspek-aspek non kependidikan dalam analisisnya. Pendekatan ini pula yang digunakan dalam kajian ini. Oleh karena itu kajian ini juga berupaya melihat kaitan antara berbagai perubahan sosial dan keagamaan di Karesidenan Palembang dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa kolonial.

B. Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Islam di Karesidenan Palembang

1. Tradisi Pendidikan Islam sebelum Kebangkitan Madrasah dan Sekolah Islam

a. Tradisi Keilmuan Islam Era Kesultanan Palembang Darussalam

Secara historis, pembentukan tradisi keilmuan dan pengajaran agama Islam di Sumatera Selatan,

⁵Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)

khususnya Palembang, tampaknya telah dimulai pada era Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-18. Pada masa Kesultanan juga terjadi perkembangan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para ulama dan didukung sepenuhnya oleh para Sultan Palembang Darussalam sejak akhir abad ke-17 dan awal abad ke-19 dengan Keraton Kesultanan Palembang sebagai pusat pengkajian Islam dan sastra. Pada masa ini Palembang menjadi pusat perkembangan keilmuan Islam dan sastra Melayu di Nusantara pasca kemunduran Kerajaan Aceh yang menjadi pusat studi Islam dan sastra Melayu pada periode sebelumnya⁶.

Beberapa ulama dan beberapa kalangan non ulama Palembang telah menghasilkan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu-ilmu Islam dan sastra Melayu. Para penulis ini dibagi dalam tiga kelompok⁷. *Pertama*, para penulis karya-karya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu tauhid, tasawuf, tarekat, tarikh dan Alquran. Di antaranya adalah Syekh Syihabuddin bin Abdullah

Muhammad yang menulis kitab *Risâlât dan 'Aqîdat al-Bayân*. *Kedua*, para penulis dalam bidang sastra. Di antaranya adalah Sultan Mahmud Badaruddin II yang menulis *Syair Sinyor Kosta dan Hikayat Martalaya*. *Ketiga*, para penulis dalam bidang sejarah, misalnya Pangeran Tumenggung Karta Menggala, yang menulis *Cerita Negeri Palembang dan Hikayat Mahmud Badaruddin*.

Pasca keruntuhan Kesultanan Palembang produktivitas ulama menjadi turun drastis, untuk tidak mengatakannya stagnan karena hilangnya patronase dan dorongan dari sultan kepada ulama untuk mengembangkan ilmu agama Islam dan sastra Melayu; dan pasca pergantian kekuasaan ke tangan Belanda pada tahun 1823 pusat studi Islam dan sastra Melayu hancur. Belanda merampas koleksi perpustakaan istana yang dimiliki oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dan membawanya ke Batavia⁸. Dengan hilangnya institusi pendorong pengembangan ilmu-ilmu agama Islam yang bersifat istansentris, maka tradisi keilmuan Islam secara perlahan diambil alih

⁶Menurut Steenbrink, telah terjadi pergeseran pusat studi Islam dan sastra Melayu di Nusantara selama periode abad ke-14 sampai abad ke-20. Pergeseran pusat keilmuan dan sastra tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: Pasai (1300-1450 M), Malaka (1450-1511), Johor (1511-1580), Aceh (1580-1680), Palembang dan Banjarmasin (1680-1800), Riau (1800-1900), dan Sumatera Barat (1880-1930). Lihat Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: UI Press, 1984, h. 65-66.

⁷Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 92

⁸Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, h. 97-98.

oleh para ulama independen yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di tengah masyarakat melalui institusi pendidikan Islam tradisional.

Sampai dengan awal abad ke-19 proses islamisasi di kalangan masyarakat semakin intensif. Hal ini terutama ditandai dengan makin banyaknya pemeluk Islam, baik di Kota Palembang maupun di pedesaan. Akan tetapi, kepemelukannya penduduk terhadap Islam ini tampaknya tidak segera diikuti dengan kesetiaan menjalankan ajaran Islam. Perubahan situasi keagamaan masyarakat baru terjadi setelah tahun 1850-an yang ditunjukkan oleh makin banyaknya pemeluk Islam dan meningkatnya ketaatan mereka terhadap ajaran Islam⁹. Meningkatnya ketaatan terhadap ajaran agama Islam tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan guru-guru agama Islam yang menginspirasi munculnya kecenderungan masyarakat Palembang untuk belajar ilmu-ilmu agama Islam guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pengamalan Islam mereka masing-masing. Dari kegiatan belajar agama inilah tradisi pendidikan Islam di Palembang terbentuk. Pada awalnya (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) tradisi ini mengambil format pengajaran agama di rumah atau di langgar.

b. Lembaga dan Sistem Pendidikan Islam Tradisional pada Masa Awal

Terdapat tiga lembaga pendidikan utama yang berperan penting dalam proses transfer dan pemeliharaan ilmu-ilmu agama Islam di Sumatera Selatan pada masa awal, yaitu rumah, langgar, dan masjid. Pendidikan yang diselenggarakan di rumah berbentuk pengajaran agama Islam pada tingkat paling dasar, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, ibadah shalat dan membaca ayat-ayat Alquran yang dibaca dalam shalat. Lembaga pendidikan tradisional lainnya yang lazim digunakan sebagai tempat bagi proses pendidikan Islam pada masa awal adalah langgar dan masjid. Kedua sarana ini adalah juga tempat diajarkannya materi pengajaran agama Islam elementer. Masjid juga merupakan tempat di mana anak yang telah menamatkan pengajian pada tingkat dasar dapat meneruskan pada tingkat pengajian kitab yang mencakup pelajaran bahasa Arab, fikih dan tauhid. Selanjutnya, pada tingkat kedua pelajarannya adalah pendalaman kitab ditambah dengan tafsir, hadis, tasawuf, dan hisab. Pengajian tingkat kedua ini diadakan di Masjid Agung Palembang oleh khatib imam dan khatib

⁹Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius Islam di Palembang: 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), h. 6

penghulu. Dapat disimpulkan bahwa sebelum tahun 1925 pengajaran agama di kalangan masyarakat muslim Palembang masih bersifat tradisional¹⁰.

e. Sayyid, Ulama, dan Penghulu: Profil Para Pendidik Muslim Awal

Dari awal perkembangan Islam sampai dengan masa kolonial pada awal abad ke-20, para pendidik muslim yang banyak berperan dalam transfer dan pemeliharaan ilmu-ilmu keislaman terutama adalah para guru agama Islam, sayyid, ulama, dan penghulu. Salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh beberapa kalangan sayyid dari komunitas 'Alawiyin Palembang ini adalah membangun langgar di wilayah pemukiman mereka yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus ruang belajar untuk pelajaran agama Islam.

Di samping oleh para sayyid, pendidikan dan pengajaran agama Islam juga dilakukan oleh ulama, baik ulama kesultanan maupun ulama independen. Pengajaran agama Islam, baik di rumah, langgar, maupun masjid juga dilakukan oleh Pangeran Penghulu Nata Agama (penghulu), yang dibantu oleh staf-stafnya. Mereka

ini adalah pejabat agama yang diangkat oleh sultan dan penguasa kolonial dengan tugas mengatur berbagai urusan keagamaan dalam masyarakat muslim Palembang.

2. Modernisasi Pendidikan Islam: Kebangkitan Madrasah dan Sekolah Islam

a. Latar Belakang dan Asal-usul Sistem dan Lembaga Madrasah dan Sekolah Islam

Data yang ada menunjukkan bahwa proses transformasi dari pendidikan Islam yang bersifat non formal menjadi pendidikan formal menemukan momentumnya pada pertengahan dasawarsa ketiga awal abad ke-20 yang diawali munculnya lembaga pendidikan Islam dalam bentuk yang benar-benar klasikal menurut konsep modern pada tahun 1925 dalam format madrasah. Paling tidak terdapat dua madrasah yang mula-mula didirikan pada tahun ini, yaitu Madrasah Diniyah Aliyah di Kampung Sekanak 28 Ilir Kota Palembang yang didirikan oleh "Perkoempoelan Dagang Islam Palembang"¹¹ dan Madrasah Islamiyah di Onderafdeeling Tanjung Raja (Afdeeling Ogan Ilir)¹².

Keberadaan sistem dan lembaga pendidikan Islam yang ber-

¹⁰Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, h. 146

¹¹Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, h. 149.

¹²"Perajaan Sekolah Agama di Tandjoeng Radja", dalam *Pertja Selatan* No. 17, 22 Februari 1927, h. 3.

sifat formal dengan sistem klasikal di Karesidenan Palembang jika dilihat dari perspektif historis dan sosiologis dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut. *Pertama*, lahirnya kesadaran pada diri masyarakat muslim bahwa pendidikan memainkan peranan penting bagi upaya mencerdaskan umat Islam yang masih tertinggal, sementara lembaga pendidikan yang diadakan oleh pemerintah kolonial belum dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Kesadaran ini sangat menonjol di kalangan warga Alawiyyin Palembang yang menganggap bahwa umat Islam Palembang sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Tionghoa yang telah lebih dahulu mendirikan organisasi dan lembaga pendidikan¹³. *Kedua*, lahirnya spirit pembaharuan di kalangan masyarakat muslim yang di pengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di beberapa wilayah di Indonesia pada awal abad ke-20, khususnya pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Al-Irsjad¹⁴. *Ketiga*, adanya anggapan masyarakat bahwa lembaga pendidikan

Belanda hanya mementingkan masalah-masalah duniawi dan mengabaikan pelajaran agama, bahkan mengandung misi Kristenisasi terselubung yang dikhawatirkan membahayakan masa depan agama generasi muslim Palembang di kemudian hari¹⁵. *Keempat*, adanya keinginan untuk mengembangkan kegiatan dakwah Islam di tengah masyarakat¹⁶.

Sementara itu, secara kelembagaan, asal-usul keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal-klasikal di wilayah ini dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, madrasah-madrasah tersebut merupakan transformasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional dalam bentuk pengajaran agama Islam di rumah atau langgar. Di Kota Palembang contoh transformasi semacam ini dapat dilihat dari kasus berdirinya Madrasah Qur'aniyah yang diawali kegiatan pengajaran agama secara tradisional dalam bentuk pengajian yang diberikan oleh H. Muhammad Yunus, seorang lulusan studi Islam yang baru kembali dari Mekkah, di bawah sebuah langgar di Kampung 15 Ilir wakaf dari Kemas H.

¹³"Seroean Ittihadoel Ihsan", dalam *Pertja Selatan*, No. 32, 25 Oktober 1926, h. 6; "Vergadering al-Ihsan", dalam *Pertja Selatan*, No. 55, Selasa 15 Mei 1928, h. 2

¹⁴"Pergerakan Agama Islam", dalam *Pertja Selatan*, No. 22, Selasa, 21 Pebruari 1928, h. 1

¹⁵"Seroean boeat Memadjoekan Anak-anak pada Onderwijs", dalam *Pertja Selatan*, No.27, 7 Oktober 1926, h. 1. Masalah kristenisasi ini akan dibahas lebih jauh pada Bab V.

¹⁶"Conferentie Moehammadijah Wilajah Tjabang Palembang ke VIII", dalam *Pertja Selatan*, No. 149, 13 Desember 1938, h. 10-11.

Akib¹⁷. Karena semakin besarnya minat masyarakat terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam, maka pengajian ini kemudian ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang lebih formal dan kegiatan belajar-mengajar segera dipindahkan ke rumah Kemas H. Akib sendiri pada tahun 1926¹⁸. Kedua, kebanyakan madrasah atau sekolah Islam didirikan tanpa preesiden lembaga tradisional sebelumnya dan bukan hasil dari transformasi, melainkan sengaja didirikan dalam bentuk madrasah dan sekolah sejak awal. Dengan kata lain, telah terjadi upaya pembaharuan atau modernisasi sejak awal pendirian berbagai lembaga pendidikan Islam tersebut sehingga yang muncul kemudian adalah sebuah sistem dan lembaga pendidikan Islam yang lebih modern dibandingkan dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional yang pernah ada sebelumnya. Contoh hal ini adalah kasus pendirian sekolah agama di desa Suralangun yang didahului oleh pertemuan beberapa tokoh setempat dalam sebuah forum

musyawarah dengan kesepakatan mendirikan "Perkoempoelan Sekolah Agama", yang diikuti pemilihan pengurus dan pendirian madrasah di desa tersebut¹⁹.

Memasuki tahun 1930-an muncul berbagai lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Karesidenan Palembang. Di Kota Palembang, misalnya, muncul beberapa lembaga pendidikan, yaitu: Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir, Madrasah Arabiyyah 13 Ulu, Madrasah Qur'aniyah, Madrasah Nurul Falah²⁰, Madrasah-madrasah Muhammadiyah, Madrasah Darul Funun, dan Madrasah Ma'had Islami. Sementara itu, di wilayah pedesaan terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam bidang pendidikan Islam. Setelah berdirinya Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, muncul berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya, antara lain, Madrasah Islamiyah Sekayu (1926), Sekolah Al-Irsyad Pagar Dewa (1927), Sekolah Agama di OKU (1929), Sekolah Agama di Rawas (1929), Sekolah Agama di Muara Dua (1930-an), Sekolah

¹⁷"Rapat Oemoem Qoeraniyah", dalam *Pertja Selatan*, No. 140, 12 Oktober 1939, h. 6

¹⁸Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, h. 149.

¹⁹"Perkoempoelan Sekolah Agama", *Pertja Selatan* No. 70 (1929), h. 2

²⁰Sampai dengan pertengahan November 1938 PNF telah mengoperasikan madrasah dalam tiga tingkatan: ibtidaiyah, tsanawiyah, dan 'aliyah. Pada tingkat ibtidaiyah, Nurul Falah mempunyai beberapa cabang madrasah, yakni Madrasah Ibtidaiyah di 22 Ilir, 29 Ilir, Kotanegara, dan Bumigenep (Lampung). Pusat Perguruan Nurul Falah sendiri berada di 29 Ilir dan 4 Ulu. Selain itu, cabang madrasah terdapat pula di 5 Ulu, beberapa desa seperti Ulak Bandung, Rawas, Lubai, dan bahkan di Kotabumi, Lampung. Nurul Falah juga sempat mendirikan madrasah khusus puteri bernama Madrasah Noer Iboe yang dibuka secara resmi pada 10 April 1939.

Agama di Lahat (1930-an), Sekolah Agama di Muara Enim (1930-an), dan Sekolah Agama di Baturaja (1930-an).

Di samping dalam format madrasah, lembaga pendidikan Islam di karesidenan Palembang juga muncul dalam format sekolah umum ala Belanda, tetapi *met de qur'an*²¹, artinya dalam penyelenggaraan pendidikannya juga menyajikan materi pelajaran agama bagi para siswanya. Muhammadiyah cabang Palembang, yang berdiri pada Januari 1931 di Kampung 20 Ilir Palembang, adalah yang pertama membuka jenis lembaga semacam ini dengan mendirikan *Holland Inlands School* (HIS) pada 1933 di Kampung Kepandean di sisi Ilir Kota Palembang²². Sekolah Islam lainnya adalah *Standaard school* yang didirikan di Plaju pada pertengahan 1930-an, *School, Schakelschool* 5 kelas (sejak 1 Agustus 1936), dan *Volksschool* 3 kelas sebagai *onderbouw Schakelschool*²³. Sekolah Islam juga didirikan oleh organisasi lokal Persatuan Nurul Falah. Orga-

nisasi ini membuka *Schakelschool* dan *Muloschool* pada 1938²⁴.

b. Akar-akar Pembaharuan Madrasah dan Sekolah Islam

Penelitian awal menunjukkan bahwa dalam sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Sumatera Selatan telah tampak adanya unsur-unsur pembaharuan, baik dari segi organisasi, administrasi, kurikulum, maupun aspek-aspek penting lainnya. Dari segi kurikulum, madrasah-madrasah Nurul Falah, misalnya, di samping mengajarkan materi ilmu keislaman juga mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, *Paedagogiek*, *Recht-wetenschap*, *Staatkunde*, dan *Algemeen Ontwikkeling*²⁵.

Berbagai unsur pembaharuan yang terdapat dalam sistem dan lembaga pendidikan Islam (madrasah dan sekolah umum *met de qur'an*) di karesidenan Palembang pada masa kolonial, bersumber atau berakar dari: (1) ide-ide atau pemikiran yang dibawa oleh alumni atau siswa studi Islam dari

²¹Dalam kajian ini sekolah umum *met de qur'an* ini selanjutnya disebut "sekolah Islam" untuk membedakannya dengan format madrasah yang lebih berorientasi pada pengajaran ilmu-ilmu Islam.

²²Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, h. 169 sebagaimana dikutip dari *Pertja Selatan* No. 57, 18 Mei 1933, h. 9

²³"Onderwijs di Pladjoe", dalam *Pertja Selatan*, No. 76, 25 Juni 1936, h. 6

²⁴"Schakel dan Mulo-School Noeroel Falah Oesaha Oemat Islam Sendiri", dalam *Pertja Selatan* No. 65, 31 Mei 1938, h. 5-6.

²⁵"Noeroel Falah Palembang: Pergoeroean Doenia-Achirat", dalam *Pertja Selatan* No. 137, 15 Nopember 1938, h. 8.

pusat-pusat studi Islam di Timur Tengah. Ketika kembali ke kampung halaman, para alumni ini mendirikan lembaga pendidikan dan atau mengajarkan ilmu yang mereka peroleh kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka baik secara formal maupun non formal²⁶. (2) adopsi dari sistem dan lembaga pendidikan Barat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, misalnya sistem klasikal dengan sarana pendidikan di dalamnya, bentuk kelembagaan (sekolah umum *met de qur'an* yang menyerupai sekolah pemerintah); kurikulum atau materi pelajaran umum; dan metode pendidikan. (3) gerakan pembaharuan pendidikan di Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa (melalui guru-guru alumni perguruan Jami'at ul Khair di Betawi)²⁷ dan Sumatera Barat (khususnya melalui pendirian cabang lembaga pendidikan Islam Sumatera Barat di karesidenan Palembang dan melalui guru-guru yang merupakan alumni lembaga pendidikan Islam di Minangkabau)²⁸. (4) pemikiran dan aksi pembaharuan sosial dan keagamaan Islam yang dibawa oleh organisasi Islam semacam Muhammadiyah dan al-Irsyad²⁹.

C. Karakteristik Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam

1. Madrasah dan Sekolah sebagai Resistensi Umat Islam

a. Resistensi Umat Islam atas Kebijakan Pendidikan yang Diskriminatif

Kebijakan pendidikan pemerintah kolonial yang diskriminatif sedikit-banyak menimbulkan sikap resistensi umat Islam di karesidenan Palembang. Sikap ini tampak jelas pada kalangan muslim kaum tuo (tradisionalis) yang mengekspresikan sikapnya dengan cara memilih format madrasah dan berkiblat ke Timur Tengah dari pada format ala sekolah pemerintah. Dengan memilih format madrasah, umat Islam di satu pihak berupaya mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain, dan di pihak lain tetap berupaya memelihara ciri khas keislamannya.

Sikap kalangan muslim tradisional ini agak sedikit berbeda, misalnya, dengan Muhammadiyah cabang Palembang yang sejak awal memilih format HIS untuk sekolah

²⁶"Kegiatan Madrasah Ahliyah", dalam *Bumi Melajoe*, No. 24 9 Juni 1927, h. 1.; "Rapat Oemoem Qoeranjah", dalam *Pertja Selatan*, No. 140, 12 Oktober 1939, h. 6

²⁷"Sekolah Agama (Al Islamiah School) Tandjoeng Radja", *Pertja Selatan* No. 32 (1929), h. 3

²⁸"Comite Pendirian Thawalib School di Pagar Alam", dalam *Pertja Selatan*, No. 171, 20 Nopember 1939, h. 6.

²⁹"Pergerakan Agama Islam", *Pertja Selatan*, (1928), h. 1.

pertamanya di kota Palembang pada 1933. Dalam hal ini tampak bahwa Muhammadiyah yang mewakili kalangan Muslim modernis cenderung lebih akomodatif daripada kalangan tradisional. Meskipun pada perkembangan selanjutnya kalangan tradisional juga menggunakan format sekolah pemerintah, sebagaimana Persatuan Nurul Falah (PNF) yang mendirikan Schakelschool dan Mulo-school pada Agustus 1938, pilihan ini tidak semata-mata karena tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam batas-batas tertentu pilihan PNF terhadap format MULO, misalnya, juga merupakan wujud sikap resistensi atas politik pendidikan diskriminatif pemerintah kolonial yang membatasi calon siswa MULO pemerintah di Palembang hanya untuk anak-anak dari kalangan tertentu³⁰.

b. Resistensi Umat Islam atas Fenomena Kristenisasi

Resistensi umat Islam melalui gerakan pendidikan Islam juga ditujukan terhadap fenomena kristenisasi di karesidenan Palembang. Resistensi ini didasari kekhawatiran sebagian masyarakat muslim yang menganggap bahwa dalam penyelenggaraan sekolah-

sekolah pemerintah terdapat misi kristenisasi terselubung, padahal minat masyarakat muslim untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut cukup tinggi³¹. Fenomena kristenisasi ini tentu saja menimbulkan sikap penolakan, bahkan perlawanan dari berbagai komponen umat Islam yang peduli terhadap masa depan agama Islam dan masyarakat muslim Palembang. Oleh karena itu, salah satu fungsi penting keberadaan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam adalah membendung laju implikasi-implikasi negatif akibat dominasi sistem dan lembaga pendidikan Barat dalam bentuk tercerabutnya generasi muslim dari ajaran Islam dan konversi umat Islam ke dalam agama Kristen melalui jalur pendidikan.

c. Resistensi Kaum Tuo atas Paham Keagamaan Kaum Mudo

Bagi umat Islam yang termasuk dalam kategori kaum tuo (tradisionalis), pendirian berbagai lembaga pendidikan Islam (madrasah dan sekolah), di samping karena alasan demi kemajuan umat Islam, juga merupakan bentuk resistensi terhadap semakin berkembangnya pemahaman, organisasi, serta lembaga pendidikan

³⁰"Schakel dan Mulo-School Noeroel Falah Oesaha Oemat Islam Sendiri", dalam *Pertja Selatan* No. 65, 31 Mei 1938, h. 5-6.

³¹"Seroean boeat Memadjoekan Anak-anak pada Onderwijs", dalam *Pertja Selatan*, No.27, 7 Oktober 1926, h. 1

Islam yang didirikan oleh pengikut kaum mudo (modernis). Sejak pertengahan 1920-an jumlah para pengikut kaum mudo memang terus bertambah, khususnya di wilayah pedesaan. Demikian pula organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka dirikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkembangan organisasi dan perguruan Muhammadiyah di Karesidenan Palembang. Bentuk resistensi itu, antara lain, tercermin langsung dalam berbagai pernyataan para pengelola organisasi dan guru-guru madrasah dan sekolah itu yang menunjukkan penolakan mereka terhadap paham agama kaum mudo. Berbagai pernyataan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa paham keagamaan mereka sesuai dengan paham lama yakni paham *ahlu as-sunnah wa al-jamâ'ah* dan fikih mazhab Syafi'i sebagai fondasi ideologis dan keagamaan kaum tua. Demikian misalnya yang ditegaskan oleh Madrasah Al-Ihsan, Madrasah Ahliyah Diniyah, Madrasah Qur'aniah, dan sebagainya³². Sikap resistensi pengikut kaum tua didasari keinginan untuk membentengi anak-anak mereka dengan cara tidak memasukkannya ke dalam lembaga pendidikan kaum mudo dan memelihara tradisi keagamaan kaum tua melalui

lembaga pendidikan Islam milik mereka sendiri.

2. Madrasah dan Sekolah sebagai Bentuk Respons Umat Islam

a. Respons atas Organisasi dan Lembaga Pendidikan Komunitas Cina

Sejak awal abad ke-20, telah muncul kekhawatiran di kalangan sebagian umat Islam, khususnya masyarakat muslim peranakan Arab Palembang bahwa mereka akan tertinggal dibandingkan dengan bangsa lain, yakni etnis Tionghoa Palembang yang tampak lebih maju dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Karena itu, sejak awal abad ke-20 Muslim Arab mulai mengorganisasi diri dengan mendirikan beberapa organisasi lokal yang belakangan bergerak dalam bidang pendidikan³³.

b.. Respons Kultural Masyarakat Desa atas Masyarakat Kota

Bagi sebagian kalangan masyarakat pedesaan pedalaman (Uluan), fenomena berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah ini sedikit-banyak dapat dilihat sebagai resistensi terhadap hegemoni budaya "orang kota" (sebagian penduduk Kota Pa-

³²"Pergerakan Agama Islam", dalam *Pertja Selatan*, No. 22, 21 Februari 1928, h. 1; "Makloemat", dalam *Boemi Melajoe*, No. 10, 2 April 1927, h. 2; "Perserikatan "Qoer-Aniahschool" Palembang", dalam *Pertja Selatan*, No. 63, 23 Juni 1927 h. 5.

³³"Vergadering al-Ihsan", dalam *Pertja Selatan*, No. 55, Selasa 15 Mei 1928, h. 2

lembang). Budaya Uluan yang dianggap rendah oleh orang kota menimbulkan sikap resistensi yang diekspresikan tidak hanya melalui emansipasi dalam bidang pendidikan Barat, tetapi juga melalui upaya pendirian berbagai lembaga pendidikan Islam. Sampai dengan tahun 1929 di Uluan telah berdiri beberapa perguruan Islam. Fenomena ini dapat dianggap sebagai kebangkitan orang Uluan secara sosial maupun budaya. Karena itu, tidak heran jika keadaan ini disikapi dengan ungkapan yang menyatakan, "Ini zaman memang zaman modern telah bertoekar.... Demikian di Oeloean Palembang jang doeloenja masih dalam kegelapan perkara agama, sekarang moelai bertindak madjoe, dalam satoe2 podjok soedah berdiri beberapa boeah sekolah agama jang didirikan oleh bangsa Islam sendiri"³⁴.

3. Daya Tahan Pendidikan Islam dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

a. Daya Tahan Lembaga Pendidikan Islam

Dari 7 lembaga pendidikan Islam, 6 di antaranya cukup mampu mempertahankan kelangsungan eksistensinya hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda (1942) dan hanya satu lembaga

pendidikan yang tidak dapat bertahan, yakni Madrasah Islamiyah Tanjung Raja. Dari tujuh lembaga pendidikan Islam yang diteliti, daya tahan yang paling tinggi dan tingkat perkembangan yang paling baik ditunjukkan oleh dua lembaga pendidikan Islam, yakni madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Persatuan Nurul Falah dan Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun tingkat perkembangan yang termasuk kategori cukup baik ditunjukkan oleh Madrasah Ahliyah dan Qur'aniah. Daya tahan dan kemampuan eksistensi keduanya termasuk kategori tinggi. Tingkat perkembangan dan daya tahan yang termasuk kategori sedang ditunjukkan oleh Madrasah Al-Ihsan. Sedangkan Madrasah Arabiyah 13 Ulu menunjukkan tingkat perkembangan dan daya tahan yang rendah. Tingkat perkembangan paling rendah disertai daya tahan dan kemampuan eksistensi yang juga paling rendah ditunjukkan oleh Madrasah Islamiyah Tanjung Raja di Afdeeling Ogan Ilir yang terpaksa ditutup pada tahun 1933.

Tingginya daya tahan sebuah lembaga pendidikan Islam juga berimplikasi pada tingginya tingkat kemampuan lembaga tersebut untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah umum netral agama, baik sekolah pemerintah maupun

³⁴Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, h. 190, sebagaimana dikutip dari Surat Kabar *Pertja Selatan* No. 125 tanggal 2 Nopember 1929.

partikelir. Sebaliknya, rendahnya daya tahan sebuah lembaga pendidikan Islam tidak hanya mengakibatkan rendahnya tingkat perkembangan lembaga itu, tetapi juga rendahnya kemampuan untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan Belanda, baik negeri (*gouvernement*) maupun swasta (partikelir).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Tahan Lembaga Pendidikan Islam

Perbedaan daya tahan dan tingkat perkembangan pada Madrasah dan sekolah di Sumatera Selatan terutama dipengaruhi oleh hal-hal berikut. (1) *Peran tokoh sentral dan kualitas kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan. Daya tahan akan semakin tinggi jika tokoh-tokoh kunci mampu memainkan perannya sebagai penggerak sebuah lembaga pendidikan dan didukung pula oleh kemampuan tokoh tersebut dalam memimpin lembaganya dengan baik.* (2) *Dukungan dana yang memadai untuk kelangsungan hidup sebuah lembaga pendidikan. Minimnya dukungan dana, baik dari masyarakat maupun donatur, akan menurunkan daya tahan dan bahkan mengancam kelangsungan eksistensi sebuah lembaga pendidikan Islam.* (3) *Kualitas manajemen organisasi dan lembaga pendidikan. Manajemen yang baik pada suatu organisasi patron dan lembaga pendidikan Islam di bawahnya akan meningkatkan daya tahan lembaga*

pendidikan tersebut. Kualitas manajemen organisasi patron dicirikan oleh lancarnya suksesi kepengurusan organisasi dan minimnya konflik kepentingan dalam tubuh organisasi. (4) *Dukungan dan partisipasi masyarakat. Semakin besar dukungan dan partisipasi terhadap sebuah lembaga pendidikan Islam, semakin tinggi pula daya tahan dan kelangsungan eksistensi lembaga pendidikan tersebut.*

c. Ciri-ciri Umum Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Lainnya

Telaah terhadap perkembangan lembaga madrasah dan sekolah umum *met de qur'an* di Karesidenan Palembang selama kurun kolonial menunjukkan adanya beberapa ciri umum yang merupakan kekhasan perkembangan lembaga pendidikan Islam di wilayah ini. Ciri-ciri umum tersebut adalah sebagai berikut; (1) secara kelembagaan, pendidikan Islam di Karesidenan Palembang muncul dalam dua format lembaga yakni madrasah yang berorientasi kepada ilmu-ilmu agama Islam dan sekolah umum *met de qur'an* yang berorientasi kepada ilmu-ilmu umum, tetapi tidak melupakan ilmu agama Islam. Kedua bentuk lembaga pendidikan Islam ini masing-masing memiliki jenjang dan waktu studi yang bervariasi. Selama kurun 1925 sampai 1942 di karesidenan Palembang belum

terdapat lembaga pendidikan Islam dalam format pondok pesantren sebagaimana yang terdapat di Pulau Jawa; (2) adanya pola patronase dalam pembangunan dan pendanaan untuk kelangsungan hidup sebagian besar lembaga pendidikan Islam oleh individu ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kemampuan secara finansial³⁵; (3) pada umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam itu didirikan secara kolektif atas nama organisasi tertentu, baik yang bersifat lokal maupun nasional³⁶. Akan tetapi, terdapat pula madrasah yang didirikan atas usaha perorangan; (4) Dilihat dari segi tingkat pendidikan, madrasah atau sekolah yang dikembangkan oleh para tokoh dan aktivis pendidikan Islam di Karesidenan Palembang lebih banyak pada pendidikan tingkat dasar (madrasah Ibtidaiyah dan HIS) daripada tingkat menengah (tsanawiyah dan muloschool); (5) adanya perhatian dan upaya yang serius untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan, khususnya dengan cara mendirikan sekolah khusus

bagi kaum perempuan³⁷; (6) adanya berbagai variasi hubungan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Bentuk hubungan itu pada umumnya bersifat positif yakni dalam bentuk kerja sama dan saling mendukung antar lembaga pendidikan Islam. Bentuk hubungan lainnya bersifat negatif yang kadang-kadang memunculkan konflik dan ketegangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya; (7) adanya keterlibatan dan peranan dunia pers yang cukup besar dan signifikan dalam kegiatan dan proses perkembangan berbagai lembaga pendidikan Islam di Karesidenan Palembang; dan (8) Dalam batas-batas tertentu lembaga pendidikan Islam di Palembang berperan penting dalam meregenerasi dan mereproduksi ulama³⁸ yang mampu memelihara kesinambungan tradisi Islam dengan penguasaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu Islam dan membimbing kehidupan beragama masyarakat.

³⁵Jeroen Peeter, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang*, h. 148.

³⁶"Perserikatan "Qoer-Aniahschool" Palembang", dalam *Pertja Selatan*, No. 63, 23 Juni 1927, h. 5; "Sekolah Agama Islam", dalam *Pertja Selatan*, No. 45, 21 April 1928, h. 5; "Djoem Atoel Echwan", dalam *Pertja Selatan*, No. 16, 7 Pebruari 1929, h. 5.

³⁷"Pemboekaan Madrasah "Noer - Iboe" 4 Oe leo", dalam *Pertja Selatan* No. 43, 11 April 1939, h. 7.

³⁸Tentang riwayat hidup beberapa Ulama Palembang, lihat Zulkifli, *Ulama, Kitab Kuning dan Buku Putih: Studi tentang Perkembangan Tradisi Intelektual dan Pemikiran Keagamaan Ulama Sumatera Selatan Abad XX*, Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah, 2000, h. 36-38.

D. Muslim Tradisionalis sebagai Pelopor Pembaharuan Pendidikan Islam

Telaah terhadap sejarah awal dan perkembangan tujuh madrasah dan sekolah Islam yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pendirian lembaga dan sistem pendidikan Islam modern sejak 1925 di Karesidenan Palembang mula-mula dipelopori oleh kalangan muslim tradisionalis (kaum tuo). Mereka ini pada perkembangannya kemudian malah mendominasi kegiatan pembaharuan pendidikan Islam di ibu kota Karesidenan (Kota Palembang). Ini jelas terlihat dari kepeloporan tokoh-tokoh muslim pendiri dan pengelola Madrasah Ahliyah Diniyah, Madrasah Qur'aniyah, Madrasah al-Ihsan, Madrasah Wathoniyah, Madrasah Ma'had Islamy, dan dominasi perguruan Nurul Falah dengan cabang-cabang yang cukup banyak hingga ke beberapa desa³⁹. Dapat dikatakan bahwa mayoritas (hampir 90 persen) madrasah dan sekolah Islam di Kota Palembang didirikan dan dikelola oleh kalangan muslim tradisionalis. Sementara kalangan muslim modernis (kaum mudo), yang terutama

diwakili oleh Muhammadiyah, muncul lebih belakangan karena mereka baru mulai mendirikan lembaga pendidikan di kota Palembang pada tahun 1933. Pengaruh Muhammadiyah lebih tampak di wilayah pedesaan, dan karenanya lembaga pendidikan organisasi ini muncul lebih awal di pedesaan dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah di Sekayu pada 1926.

Apa yang terjadi di Karesidenan Palembang ini tentu saja sangat berbeda dengan kecenderungan perkembangan pendidikan Islam modern di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Minang kabau, yakni kalangan muslim modernislah (kaum mudo) yang menjadi pelopor dan penentu tren perkembangan. Murid-murid Syaikh Ahmad Khatib al-Minang kabawi, seperti Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad, adalah para muslim reformis dan pembaharu awal di Minangkabau yang tidak hanya memperkenalkan sistem pendidikan Islam modern, tetapi juga aktif dalam gerakan pembaharuan paham keagamaan (memerangi *bid'ah*, *khurafat*, paham tarikat, tidak taqlid buta pada mazhab tertentu, dan menyeru kembali kepada Alquran dan

³⁹Beberapa nama yang dapat disebut misalnya K.H. Nanang Misri, K.H. Muhammad Yunus, K.H. Abubakar al-Bastari, K.H. Tjik Wan, K.H. Masyhur Azhari, dan K.H. Abdullah Azhari.

hadis)⁴⁰. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa kepeloporan dan peran kaum tua di Karesidenan Palembang dalam pembaharuan pendidikan Islam merupakan karakteristik atau ciri utama perkembangan lembaga pendidikan Islam di wilayah ini selama masa pemerintahan kolonial.

E. Pendidikan Islam di Tengah Pergolakan Sosial, Agama dan Politik

1. Kebangkitan Organisasi dan Hubungannya dengan Dunia Pendidikan Islam

Dalam konteks munculnya kebangkitan organisasi Islam dan nasionalis sejak awal abad ke-20, terdapat tiga pola hubungan yang bersifat kelembagaan antara organisasi dan lembaga pendidikan Islam, yakni: (1) hubungan yang bersifat formal fungsional yakni sebuah organisasi berfungsi sebagai patron langsung bagi sebuah lembaga

pendidikan Islam⁴¹; (2) hubungan non formal-fungsional di mana suatu organisasi tidak secara menjadi patron suatu lembaga pendidikan, tetapi berfungsi sebagai pendukung program-program lembaga pendidikan Islam⁴²; dan (3) hubungan kemitraan yakni organisasi non pendidikan berperan sebagai mitra kerja sama bagi organisasi dan lembaga pendidikan Islam. Dalam pola hubungan yang bersifat kelembagaan ini, lembaga pendidikan Islam berperan sebagai (1) ujung tombak bagi pengembangan organisasi-organisasi Islam yang menjadi patron langsung lembaga pendidikan Islam tersebut; (2) inspirator bagi kemunculan berbagai organisasi keagamaan Islam yang mempunyai hubungan non formal fungsional dengan lembaga pendidikan Islam; (3) mitra kerja sama yang sejajar bagi berbagai organisasi non pendidikan yang bermunculan di Karesidenan Palembang ketika itu, baik organisasi politik maupun

⁴⁰Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 39-65.

⁴¹Organisasi Ittihadul Ihsan (Al-Ihsan), Perkumpulan Dagang Islam Palembang (PDIP), Ittihadul Ahliyah, Persyarikatan Qur'aniah, Persatuan Nurul Falah (PNF), Persyarikatan Muhammadiyah, dan Al-Irsyad berfungsi sebagai pengelola dan patron langsung bagi beberapa lembaga pendidikan Islam (Madrasah Al-Ihsan, Madrasah Ahliyah, Madrasah Qur'aniah, madrasah dan sekolah Nurul Falah, madrasah dan sekolah Muhammadiyah, dan Madrasah Al-Irsyad).

⁴²Organisasi semacam ini misalnya Jong Islamitten Bond (JIB) cabang Palembang, Perhimpoean Penerangan Islam (disingkat PERPI) berdiri pada akhir 1938 yang mengadakan kursus agama Islam, Pemuda Menoentoet Damai (PEMENDA) yang didirikan pada awal 1939 yang mengadakan kursus bahasa asing, kursus agama, memerangi buta huruf dan mengajarkan ilmu berpidato, dan Tarbiah Ichwaniyah (TARICH) yang didirikan oleh pemuda, pelajar dan guru-guru dari Madrasah Nurul Falah

organisasi sosial dan ekonomi, baik yang berideologi Islam maupun nasionalis netral agama.

Secara personal para aktivis pendidikan Islam berperan penting tidak hanya sebagai anggota atau penggembira dalam berbagai organisasi non pendidikan yang ada, tetapi juga pengurus aktif dan bahkan pucuk pimpinan beberapa organisasi tersebut. Tokoh dan aktivis pendidikan Islam tidak hanya peduli pada dunia pendidikan, sebagai fokus utama aktivitasnya, tetapi juga *concern* terhadap masalah-masalah keagamaan, sosial, politik maupun ekonomi. Lebih dari itu, ini juga menunjukkan bahwa aktivis dari dunia pendidikan Islam diakui eksistensi dan kemampuannya oleh sebagian besar masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi non pendidikan. Di pihak lain keterlibatan figur-figur tertentu organisasi non pendidikan dalam dunia pendidikan Islam, termasuk tokoh pers, tidak hanya menunjukkan adanya hubungan yang baik antara keduanya, tetapi juga memperlihatkan bahwa aktivis pendidikan Islam ataupun lembaga pendidikan Islam pada umumnya, cukup terbuka terhadap gagasan-gagasan progresif dari luar⁴³.

2. Konflik dan Akomodasi Kaum Tuo-Kaum Mudo

Dalam hubungannya dengan konflik keagamaan yang terjadi antara kaum tuo dan kaum muda di Karesidenan Palembang, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa konflik ini juga melibatkan eksistensi dunia pendidikan Islam, baik secara personal maupun kelembagaan. Hubungan yang tidak harmonis di antara pendukung kedua paham keagamaan tersebut tercermin melalui konflik-konflik di antara berbagai pengelola lembaga pendidikan Islam di Kota Palembang, Tanjung Raja, Lahat, Semendo, dan perbatasan Karesidenan Bengkulu⁴⁴. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan bahwa hubungan antara kedua paham tersebut dalam konteks dunia pendidikan Islam tidak selalu diwarnai konflik. Dalam hal-hal tertentu terdapat upaya akomodasi di antara keduanya.

3. Peran Aktivis Pendidikan Islam dalam Upaya Integrasi Umat Islam

Di tengah konflik keagamaan yang berkepanjangan itu sebagian aktivis pendidikan Islam menunjukkan peran aktifnya dalam

⁴³Lihat lebih jauh dalam Ismail, : "Madrasah dan Sekolah Islam di Karesidenan Palembang: 1925-1942 (Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Masa Kolonial)", *Disertai* untuk gelar doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, h. 381-394

⁴⁴Tentang jalannya konflik, lihat Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 394-412

upaya rekonsiliasi dan integrasi umat Islam melalui organisasi Madjelis Pertimbangan Igama Islam (MPII)⁴⁵ dan Ittihadoel Oelama (IO)⁴⁶. Upaya rekonsiliasi dan integrasi belum menunjukkan hasil melalui MPII yang kemudian vakum pada pertengahan tahun 30-an. Upaya ini menunjukkan hasil yang signifikan melalui peran tokoh-tokoh dan aktivis pendidikan Islam dalam IO yang didirikan tahun 1939. Melalui IO yang eksis hingga akhir masa pemerintahan kolonial, tokoh-tokoh Islam yang sebelumnya berselisih paham dan berseberangan dapat berhimpun dalam wadah yang sama dan aktif menjalankan upaya-upaya rekonsiliasi dan integrasi. Di tingkat masyarakat awam konflik antara pihak kaum tuo dengan kaum mudo perlahan mereda dan kedua belah pihak saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan.

4. Pendidikan Islam dan Pergolakan Politik

Dalam hubungannya dengan politik, dunia pendidikan Islam juga terlibat secara aktif sekurangnya dalam dua hal, yakni: (1) merespons beberapa kebijakan politik pemerintah kolonial yang secara langsung berkaitan dengan dunia pendidikan Islam Karesidenan Palembang; dan (2) merespons

situasi politik dalam dan luar negeri yang melahirkan wacana tentang aspirasi politik para aktivis pendidikan Islam.

Respons aktivis pendidikan Islam terutama ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang (1) membatasi kegiatan setiap aktivis pendidikan yang bersifat politis dan larangan melakukan segala sesuatu yang dianggap merugikan kepentingan politik pemerintah kolonial; (2) mewajibkan para siswa untuk mengikuti program wajib kerja (*heerendienst*) dan pembayaran pajak (*belasting*) bagi siswa sekolah partikelir yang tidak diakui pemerintah, termasuk siswa-siswa madrasah; dan (3) mengharuskan *muballig* dan guru-guru agama Islam memiliki surat izin dalam aktivitasnya. Kebijakan pembatasan kegiatan politik melahirkan eksesekses yang banyak merugikan dunia pendidikan Islam, sejak pembatasan dalam berbicara, penangkapan tokoh pendidikan, hingga pemecatan siswa. Terhadap kebijakan ini, sebagian aktivis pendidikan bersikap kritis dan menganggap hal ini sebagai upaya menghambat kebebasan berpikir dan menghalangi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dua kebijakan yang disebut belakangan juga direspons secara kritis dan berujung pada tuntutan penghapusan keduanya. Tuntutan

⁴⁵"Madjelis Pertimbangan Oelama", dalam *Pertja Selatan*, No. 145 8 Desember 1930, h. 1-2

⁴⁶"Ittihadoe'l 'Oelama", dalam *Pertja Selatan*, No. 10, 24 Januari 1939, h. 1

penghapusan kewajiban *heeren-dienst* dan *belasting* yang menjadi isu nasional ini cukup membuah hasil, meskipun tidak dihapuskan sepenuhnya⁴⁷.

Adapun respons atas situasi politik dalam dan luar negeri, di samping diwujudkan dalam bentuk keterlibatan langsung melalui aksi praktis juga diwujudkan oleh beberapa aktivis pendidikan Islam melalui tulisan yang dimuat di surat kabar. Respons semacam ini melahirkan wacana tentang aspirasi politik para aktivis pendidikan Islam. Melalui wacana ini mereka berusaha melakukan pembentukan opini dan membangkitkan kesadaran serta semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan upaya memperbaiki nasib dan masa depan politik bangsa Indonesia. Tujuan akhirnya adalah mencapai Indonesia merdeka dan bebas dari penindasan penjajah⁴⁸.

5. Pendidikan Islam dalam Sorotan: Wacana Pemikiran dan Polemik

Dunia pendidikan Islam juga mendapat sorotan dari masyarakat terutama melalui kritik dan polemik yang mereka sampaikan di media massa. Kritik terhadap

dunia pendidikan Islam di Karesidenan Palembang ini sebagian besar menyoroti masalah-masalah di sekitar kualitas lembaga pendidikan Islam yang meliputi kritik terhadap kurikulum yang dianggap belum memadai⁴⁹, kritik terhadap kualitas guru, dan kritik atas metode pengajaran. Di samping itu respons masyarakat juga muncul dalam bentuk gagasan, saran, dan himbauan yang bersifat konstruktif bagi kemajuan lembaga pendidikan Islam serta respons atas kebijakan pendidikan kolonial. Semua bentuk sorotan ini menunjukkan besarnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan masa depan sistem dan lembaga pendidikan Islam di Karesidean Palembang⁵⁰.

6. Reformasi dan Integrasi Pendidikan Islam: Menuju Transformasi Sosial

a. Reformasi Pendidikan Islam

Perubahan sosial yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan Islam terjadi ketika sebagian tokoh Islam dan aktivis pendidikan Islam berinisiatif melakukan upaya-upaya reformasi terhadap pendidikan Islam dan

⁴⁷Lihat Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 424-447

⁴⁸Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 447-453

⁴⁹Kritik ini dapat dilihat dalam Achmad Soerdani, "Boeah Pikiran tentang Pengadjaran di Soematera Selatan", dalam *Pertja Selatan*, No. 70, 9 Juli 1927, h. 5

⁵⁰Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 453-473⁴⁷Lihat Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 424-447

mengusung gagasan serta meng-upayakan penyatuan beberapa lembaga pendidikan Islam dalam satu organisasi. Reformasi dan integrasi pendidikan Islam ini dimotivasi terutama oleh tujuan mengubah atau mentransformasikan masyarakat muslim Sumatera Selatan dari keadaannya yang penuh dengan kekurangan dan keterbelakangan menjadi masyarakat yang lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpegang pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Aksi-aksi reformasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam, di antaranya dengan memperbaiki misi dan cita-cita (visi) pendidikan, mengubah struktur organisasi, dan upaya mendirikan sekolah Islam tinggi pada tahun 1939. Upaya reformasi pendidikan lainnya adalah mengusahakan berdirinya universitas Islam di Betawi, sebagaimana yang dipelopori oleh Muhammadiyah pada pertengahan 1938, dan upaya pembentukan Ikatan Pergeroean Agama Islam (IPAI) di Baturaja pada awal 1940⁵¹.

b. Integrasi Pendidikan Islam: Pembentukan Persatuan Perguruan Islam (PPI)

Fenomena sosial paling menarik yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan Islam adalah gagasan dan upaya integrasi

berbagai lembaga pendidikan Islam melalui pembentukan Persatuan Perguruan Islam (PPI). Pendirian PPI yang didahului oleh diskusi dan saling lempar wacana di media massa ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni: (1) kesadaran akan besarnya peran lembaga pendidikan Islam bagi peningkatan kualitas keagamaan dan keilmuan masyarakat yang berimplikasi pada besarnya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sistem dan lembaga pendidikan Islam; (2) adanya realitas bahwa berbagai perguruan Islam tidak memiliki standar yang sama dalam administrasi dan pengelolaan pendidikan sehingga menimbulkan perbedaan kualitas antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya; (3) munculnya persaingan antara satu perguruan dengan perguruan lainnya, khususnya dari segi materi pelajaran, yang membuat masyarakat gamang dalam menentukan pilihan sehingga merugikan peserta didik. Pembentukan PPI yang mendapat sambutan luas berbagai komponen masyarakat muslim baik di Kota Palembang maupun dari Iliran dan Uluu bertujuan (1) mempersatukan segenap perguruan Islam di Palembang; (2) mempertinggi dan menyempurnakan kualitas berbagai perguruan Islam; (3) mengusahakan berdirinya madrasah Islam tinggi

⁵¹Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 473-483.

sebagai rencana jangka panjang; dan (4) meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kehidupan umat Islam. Meskipun telah menetapkan program-program kerja yang relatif telah mencakup banyak aspek penting dalam sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, PPI yang menjadi harapan besar berbagai kalangan perguruan Islam di Karesidenan Palembang hanya sempat aktif beberapa bulan saja sejak pembentukannya secara resmi pada pertengahan 1938. PPI tetap vakum hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia (1942). Karena sebab-sebab yang tidak begitu jelas, PPI yang di tingkat wacana telah sedemikian matang telah gagal mewujudkan cita-cita transformasi masyarakat Islam melalui peningkatan kualitas sistem dan lembaga pendidikan Islam di kota Palembang⁵².

F. Kesimpulan

Kesimpulan umum kajian ini adalah bahwa perkembangan sistem dan lembaga pendidikan Islam modern dalam format madrasah dan sekolah Islam di Karesidenan Palembang selama masa pemerintahan kolonial Belanda cenderung didominasi oleh peranan kalangan muslim tradisional (kaum tuo) dari pada kalangan muslim reformis (kaum mudo).

Kalangan tradisional telah memelopori upaya pembaharuan lembaga dan sistem pendidikan Islam di wilayah ini sejak 1925 dan berperan secara dominan terutama dalam konteks perkembangan pendidikan Islam di ibukota karesidenan (Kota Palembang). Fakta ini berbeda dengan kecenderungan perkembangan pendidikan Islam modern di wilayah Minangkabau di mana pelopor dan penentu tren perkembangan pendidikan Islam adalah kalangan muslim reformis (kaum mudo). Ini menunjukkan bahwa sejarah perkembangan pendidikan Islam modern di Karesidenan Palembang tidak mengikuti pola dan kecenderungan yang terjadi di wilayah Minangkabau atau wilayah lainnya di Indonesia. Inilah karakteristik utama perkembangan lembaga pendidikan Islam di Karesidenan Palembang selama masa pemerintahan kolonial.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Azra, Azyumardi, "The Rise and the Decline of the Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatra during the Dutch Colonial Government", *Tesis* M.A. di Departement of Middle

⁵²Ismail, "Madrasah dan Sekolah Islam", h. 483-497.

- Languages and Cultures, di
Columbia University, Amerika
Serikat, 1990, t.d.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam
di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
Press, 1998
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan
Perkembangannya*, Jakarta:
Logos, 1998
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam
di Indonesia: 1900-1942*, Jakarta:
LP3ES, 1990
- Peeters, Jeroen, *Kaum Tuo-Kaum
Mudo: Perubahan Religius Islam
di Palembang: 1821-1942*,
Jakarta: INIS, 1997
- Pertja Selatan, 1-16 (Palembang)
1926-1941*
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan
Administrasi Islam: Studi tentang
Pejabat Agama Masa Kesultanan
dan Kolonial di Palembang*,
Jakarta: Logos, 1998
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek
Tentang Islam di Indonesia Abad
ke-19*, Jakarta: UI Press, 1984
- _____, *Pesantren, Madrasah dan
Sekolah: Pendidikan Islam dalam
Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES,
1997
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pen-
didikan Islam di Indonesia*,
Jakarta: Hidakarya Agung, 1996
- Zuhairini (et. al.), *Sejarah Pendidikan
Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
1992
- Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan:
Pemikiran dan Peranannya
dalam Lintasan Sejarah*, Palembang:
Penerbit Universitas
Sriwijaya, 1999